

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional, PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Cholisin Pendidikan Kewarganegaraan adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Saputro dan Dr. Nasiwan, M.Si. dalam jurnalnya 2016, hlm. 9).

Menurut Edmonson (sebagaimana dikutip A. Ubaedillah 2011, hlm. 5) makna *Civics* selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Cogan dan Derricott (sebagaimana dikutip Abdul Aziz Wahab dan Sapriya 2011, hlm.32) bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah perluasan dari *civic* yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga disebut sebagai pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara.

Melihat dari beberapa pendapat para ahli bahwa dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk pembentukan karakter warga negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga warga negara Indonesia dapat mengetahui perannya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting dalam pengembangan pola pikir, sikap, perilaku rukun, damai, serta toleransi akan menjadi antitesis terhadap konflik.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang disiapkan pemerintah bagi warga negara yang bertujuan agar setiap warga negara menjadi warga negara sebagaimana yang diharapkan oleh negara. Pemerintahan di setiap negara memiliki cita-cita mengenai warga negara kedepannya. Dengan pendidikan kewarganegaraan juga dapat membentuk karakter dari warga negara tersebut.

Berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI NO 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut :

- a. Visi, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.
- b. Misi, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara

konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

- a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ubedillah dan Rozak (sebagaimana dikutip Pipit Widiatmaka 2016, hlm. 190) mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.

- a. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- b. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
- c. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

Menurut Somantri (sebagaimana dikutip Abdul Aziz Wahab dan Sapriya 2011, hlm. 312) bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan hendaknya dirinci dalam tujuh kurikuler yang meliputi : (1) Ilmu

Pengetahuan yang mencakup fakta, konsep dan generalisasi,. (2) Keterampilan intelektual dan keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif,. (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan,. (4) Keteramplan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan dalam paradigma baru mengusung tujuan utama mengembangkan *civic competences* yaitu *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), *civic disposition* (nilai, komitmen dan sikap kewarganegaraan) dan *civic skill* (perangkat keterampilan intelektual, sosial dan pernsonal kewarganegaraan) yang seyogyanya dimiliki oleh individu warga negara. (Sunatra, 2016, hlm. 95)

Dapat disimpulkan dari satu pendapat para ahli dan peraturan yang diterapkan di negara Indonesai bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebagai wadah untuk pembelajaran warga negara agar memiliki visi serta misi intelektual yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Serta menjadikan warga negara yang memiliki komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ikut serta dalam pembangunan bangsa ini.

Menurut Farida Sekti Pahlevi (2017, hlm. 71, 72) terdapat ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi meliputi substansi kajian sebagai berikut:

- a. Hakikat pendidikan kewarganegaran dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.
- b. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
- c. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstiusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegarakebangsaan Indonesia
- e. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.
- f. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.
- g. Dinamika historis konstiusional, sosiaL-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukumyang berkeadilan.
- h. Dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.
- i. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidak kajian yang bersifat multifaset dehgan konteks lintas bidang keilmuan yang berdifat interdisipliner/mulitidisipliner/multidimensional. Namun secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki objek kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk aspek hak dan kewajiban (*duties and rights of citizen*). (Abdul Aziz Wahab dan Sapriya 2011, hlm 316)

Somantri (sebagaimana dikutip Abdul Aziz Wahab dan Sapriya 2011, hlm. 316) menyatakan bahwa objek studi *civic* dan *civic education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara.

Dengan melihat pendapat dari dua alhi berpendapat mengenai objek kajian pendidikan kewarganegaraan bahwa fokus kajian diarahkan

pada bidang telaahannya, maka sebenarnya objek kajian pendidikan kewarganegaraan itu adalah warga negara. Perlu disadari bahwa warga negara itu sangat kontekstual sehingga bidang kajian ini merupakan konteks dimana warga negara itu hidup dan berada.

2. Pendidikan Politik

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) dalam *The Civic Culture*, sosialisasi politik disinonimkan dengan istilah pendidikan politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama dalam proses pembentukan budaya politik (*Politik Culture*). Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Kartini Kartono (sebagaimana dikutip Sunatra. 2016, hlm 42) juga menjelaskan bahwa pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *politische bildung*. Yang dimana disebut *forming* karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya ditengah masyarakat. Sedangkan disebut *bildung* (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyatakan aktivitas membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.

Dalam bukunya *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Maju* Kartini Kartono juga menjelaskan beberapa definisi mengenai pendidikan politik yaitu sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian agar menang dalam perjuangan politik
- b. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik

Rusadi Kantaprawira (sebagaimana dikutip Sunatra. 2016, hlm. 43) menjelaskan bahwa pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik meliputi *political*

education, political socialization, citizenship training yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara dan pada akhirnya warga negara mellek politik.

Pendapat lain mengenai pendidikan politik diungkapkan oleh Alfian (1986) dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, bahwa pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Menarik kesimpulan dari pengertian pendidikan politik menurut para ahli yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka pendidikan politik yaitu pengetahuan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang memberikan landasan dalam bertindak laku dan kehidupan politik. Dengan pendidikan politik tersebut maka setiap warga negara memiliki kesadaran akan politik dan kehidupan politik namun tetap bertanggung jawab secara etis atau moral untuk mencapai tujuan politik tersebut.

Pendidikan politik memiliki tiga makna yaitu pendidikan politik sebagai sosialisasi politik, pendidikan politik sebagai politik etis, dan pendidikan politik sebagai ilmu. (Sunatra, 2016, hlm. 57)

Menurut Almon dan Verba (sebagaimana dikutip Sunatra, 2016, hlm. 59) menyatakan *political socialization is a science and as an art* dalam membentuk budaya politik. Pendidikan politik adalah keduanya, sebagai ilmu dan sebagai seni.

Bahwa dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik memiliki kedudukan sebagai ilmu dan sebagai seni. Yang dimana ilmu lebih banyak membahas mengenai kebenaran dan seni lebih banyak membahas dari sisi budaya politiknya, yaitu perilaku politik dari para elit politik dan warga negara.

Dalam bukunya *Pendidikan Politik Kewarganegaraan* (Sunatra, 2016, hlm 60) pendidikan politik memiliki teori-teori dan konsep-konsep

ilmu pengetahuan (epistemology) yang memberikan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah ilmu. Memiliki teori-teori mengenai kebenaran, objektivitas, subjektivitas, generalisasi dan hukum berdasarkan filsafat ilmu. Disamping itu pendidikan politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Pendidikan politik memerlukan intuisi politik untuk memberikan arah pendidikan yang benar dan menyuluruh tentang pentingnya pembentukan karakter bangsa. (2) Pendidikan politik memerlukan imajinasi membangun budaya politik. (3) pendidikan politik memerlukan daya nalar yang kuat untuk mendorong tingkat emosional warga negara. (4) Pendidikan politik memerlukan metode dan gaya komunikasi.

Tujuan pendidikan politik dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan politik ddarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono (sebagaimana dikutip Sunatra, 2016, hlm 64) ialah : (1) Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, siswa, warga masyarakat, rakyat) mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara. (2) Memperhatikan dan mengupayakan peranan insani

dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya).

Menurut Wahab (Komarudin, 2005), “....., pendidikan politik bertujuan membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara.”

Sejalan dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyebutkan tujuan pendidikan politik adalah untuk mencitakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pendidikan politik itu adalah untuk meningkatkan pemahaman warga negara mengenai politik atau kesadaran warga negara akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sedangkan melihat fungsi dari pendidikan politik yaitu untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Berarti pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Sunatra (2016, hlm. 77) menyatakan bahwa fungsi pendidikan politik secara umum belum berhasil seperti yang diharapkan. Kondisi objektif pendidikan politik saat ini : (a) Secara umum belum mampu menanggapi semua perubahan yang terjadi dalam kehidupan politik. (b) Pendidikan politik masih dikesampingkan oleh elite politik dalam setiap kebijakan atau keputusan politik. (c) Pengajaran yang sesungguhnya

terjebak dalam kungkungan paradigma feodalistik, formal, doktriner, dan kompetensi tenaga pengajar yang kurang sesuai.

Pendidikan politik dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan menurut pendapat Branson (sebagaimana dikutip Sunatra, 2016, hlm. 99) karakteristik warga negara melek politik ialah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang diformulasikan ke dalam tiga komponen penting yaitu : (1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. (2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan) adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan. (3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan “Pendidikan nasional berfungsi membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Betapa eratnya kaitan antara pendidikan karakter dengan pendidikan politik yang memiliki misi untuk membentuk warga negara yang baik. Oleh karena itu keduanya harus dipadukan dalam satu gerakan nasional, sehingga warga negara melek politik.

Pendidikan politik bagi generasi muda melalui proses kewarganegaraan harus mendapatkan jaminan konstitusional untuk melindungi hak-hak individu, tanggung jawab pribadi dan hak-hak kewarganegaraan. Menurut Branson (dikutip Sunatra, 2016, hlm. 134)

tanggungjawab itu meliputi : *Pertama*, tanggungjawab pribadi seperti merawat diri, menafkahi keluarga, memelihara, mengasuh dan mendidik, menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi perbuatan yang dilakukan, menghormati hak-hak dan kepentingan orang lain dan sikap sopan santun. *Kedua*, tanggungjawab kewarganegaraan seperti taat pada hukum, memiliki kepekaan dan mengikuti isu-isu publik, membayar pajak,.....”

Sunatra (2016, hlm. 13) dalam bukunya *Pendidikan Politik Kewarganegaraan* menyatakan bahwa pentingnya pendidikan politik dalam rangka pembinaan dan pengembangan bagi generasi muda : (1) pembinaan kerohaniann, kepribadian dan kebudayaan agar generasi muda benar-benar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur dan berkepribadian Pancasila. (2) Sasaran pembinaan jasmaniah agar generasi muda memiliki jasmani yang sehat, segar dan tangkas serta terampil yang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. (3) Sasaran pembangunan intelektual generasi muda mampu berpikir rasional. (4) Sasaran pembinaan dan pengembangan kerja dan profesi agar generasi muda mampu menjadi tenaga kerja yang produktif dan kreatif. (5) Sasaran pembinaan dan pengembangan sikap mental generasi muda agar menjadi penerus bangsa dan pembangunan nasional. (6) Sasaran pembinaan patriotisme dan disiplin nasional agar menjadi kader-kader pemimpin bangsa yang cakap, bijak, berkepribadian, tanggungjawab dan penuh engabdian.

3. Ilmu Politik

Menurut Budiardjo (2008:14) bahwa pengertian politik dianggap sangat penting, karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari suatu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas, aktifitas seperti inilah yang diartikan sebagai politik.

Disamping itu bisa juga kita katakan bahwa politik itu merupakan usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Maka

pengertian politik dalam hubungan ini dianggap penting. Hal ini disebabkan masyarakat mengatur kehidupannya secara kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering dihadapkan pada persoalan dengan terbatasnya sumber alam atau perlu dicari suatu cara distribusi sumber daya agar semua warga negara merasa bahagia dan merasa puas, aktifitas seperti inilah yang diartikan dengan politik.

Pada umumnya politik (*politic*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis. (Miriam Budiardjo. 2008, hlm 15)

Dengan demikian untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka akan ada usaha-usaha yang dilaksanakan dengan berbagai cara yang terkadang dapat menimbulkan perbenturan satu sama lainnya untuk tercapainya tujuan tersebut. Dan politik itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan umum (*public policy*), dan alokasi nilai-nilai (*allocations of values*) dari semua sumber yang ada.

Ada beberapa konsep yang menjelaskan mengenai politik yang diantaranya yaitu yang pertama politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik adalah sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik itu adalah sebagai kegiatan yang terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik adalah sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. (P. Anthonius Sitepu. 2012, hlm 22)

Melihat dari konsep politik diatas bahwa politik yaitu usaha sadar seseorang warga negara dalam mencapai tujuannya yang berkaitan dengan pemerintahan disuatu negara dengan tetap melaksanakannya

sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan atau dari suatu negara.

Menurut Inu Kencana Syafii (2005, hlm. 7), politik dalam bahasa Arabnya disebut “siyasyah” atau dalam bahasa Inggris “politics”. Politik itu sendiri berarti cerdas dan bijaksana. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan politik galibnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakekat Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat umum, peranan partai, dan pemilihan umum.

Menurut Arifin Rahman (2005, hlm 7) kata politik berasal dari bahasa Yunani “polis” adalah kota yang berstatus Negara/Negara kota. Segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut “politike techne”. Kemudian ia juga berpendapat politik ialah pengertian dan kemahiran untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan Negara.

Makna politik maupun ilmu politik sangat beragam, tidak ada kesatuan pandangan tentang politik maupun ilmu politik. Karena perspektif yang digunakan para ahli memang berbeda-beda. Ramlan Surbakti (2010, hlm. 12) mengajukan 6 pendekatan untuk memahami arti politik.

a. Pendekatan Kekuasaan

Menurut pendekatan ini, yang dimaksud politik adalah cara-cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam pendekatan ini perspektif politik merupakan sesuatu yang kotor, karena usaha untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan cara-cara yang tidak legal dan amoral.

b. Pendekatan Institusional

Menurut pendekatan ini, politik adalah negara dengan institusi-institusinya. Jadi yang dipelajari tentang politik adalah mengenai tugas dan kewenangan atau apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.

c. Pendekatan moral

Pendekatan ini memandang politik adalah sesuatu yang mulia, karena politik merupakan kegiatan untuk mendiskusikan dan merumuskan “good society” atau “the best regime”. Misalnya dengan kegiatan ini kemudian muncul pemikiran tentang pemerintah yang bersih dan melayani publik.

d. Pendekatan Konflik

Menurut pendekatan ini politik adalah kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kepentingan. Konflik yang dimaksud disini mencakup semua pertentangan yang menyangkut upaya mencari dan mempertahankan kepentingan.

e. Pendekatan fungsional

Politik adalah kegiatan yang menyangkut alokasi nilai-nilai kepentingan yang diumumkan dalam kebijaksanaan publik..

f. Pendekatan Analisis Wacana Politik

Politik adalah kegiatan mendiskusikan atau mendefinisikan situasi dari suatu fenomena politik, tetapi ada pula yang mendefinisikan sebagai hak prerogatif, juga muncul definisi sebagai upaya konsolidasi kekuatan dengan mengangkat orang-orangnya sendiri yang pada dasarnya melakukan KKN.

4. Kesadaran Politik

Secara harfiah ‘kesadaran’ berasal dari kata ‘sadar’, yang berarti insyaf, merasa, tahu, mengerti. Jadi, kesadaran atau keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Kesadaran mempunyai dua komponen, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Fungsi jiwa menurut (Wirawan. 1993: 185) adalah suatu aktifitas kewajiban yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah dari pada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya. Dengan demikian kesadaran menjadi bagian dari kejiwaan manusia, dan terkadang diartikan dengan hati nurani. (sebagaimana dikutip Rachda Anjani Somawinata dalam skripsinya. 2017, hlm 19)

Kesadaran politik tidak hanya keikutsertaan dalam pemilihan umum. Akan tetapi diukur dari peran serta mahasiswa dalam mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintahan selama memegang kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya kesadaran politik yang ada pada diri mahasiswa secara otomatis akan mendukung sekali proses adanya sosialisasi politik yang dilakukan, maka kita sebagai mahasiswa atau sebagai warga negara tentunya minimal akan paham mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu maka akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik.

M. Taopan dalam tulisannya yang berjudul kesadaran politik (2011) menyatakan bahwa kesadaran politik merupakan proses batin yang menampakan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat begitu kompleks dan beratnya tugas yang dipikul negara dalam hal ini

para penyelenggara negara. (sebagaimana dikutip Rachda Anjani Somawinata dalam skripsinya. 2017, hlm 20)

Kesadaran politik pada hakekatnya merupakan keinsyafan setiap individu atau masyarakat akan pentingnya nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik tersebut tidak diperoleh seseorang dengan sendirinya melainkan melalui proses sosialisasi politik yang didalamnya terdapat proses pembelajaran mengenai semua hal tentang politik. Dengan kata lain kesadaran politik merupakan hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga sosialisasi politik. Dengan demikian sosialisasi kesadaran politik mengandung makna “proses penyadaran seseorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dilingkungannya yang ditujukan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya”.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Eko, 2000: 14) dalam Chandu (2012). Kesadaran politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai (Idshvoong. 2011).

Surbakti (1992) menyebutkan aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. (Sebagaimana dikutip Muhammad Farid Salaman Alfarisi RM dalam skripsinya. 2014, hlm 4)

Dengan adanya kesadaran politik setiap individu dapat terjun ke dalam masyarakat dengan baik, agar memilih pimpinan yang baik sesuai dengan kriteria masyarakat bangsa dan negara. Kesadaran politik akan

tercipta dengan adanya sosialisasi politik. Kesadaran politik akan sangat bergantung kepada latar belakang pendidikannya. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi cenderung mempunyai kesadaran politik yang relatif tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, maka kesadaran politiknya relatif rendah sehingga menentukan pembinaan.

Kesadaran politik mahasiswa kini mulai memudar, hal ini dikarenakan terjadi akibat kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengikis idealisme mahasiswa atau para pelajar umumnya. Padahal realita dalam bentangan negeri ini mahasiswa memiliki peran besar sebagai agen perubahan, karena itu kesadaran politik mahasiswa perlu ditingkatkan, mahasiswa bukan hanya kuliah, dapat nilai IP besar tetapi harus merakyat dan peduli terhadap kepentingan rakyat. Melihat dari sejarah, ujung tombak perubahan khususnya pada dunia politik selalu dilakukan oleh mahasiswa, sebab mahasiswa itu bukan hanya berfungsi sebagai intelektual sosialis.

Dapat dilihat di kampus Universitas Pasundan yang kita ambil salah satu Fakultas yaitu Fakultas Teknik, dimana hampir semua mahasiswa hanya menyibukkan diri dengan tugas-tugas kuliahnya tanpa mereka melihat kondisi dari Bangsa ini. Mereka memang meleak akan kemajuan teknologi namun mereka belum meleak akan permasalahan politik yang terjadi di Indonesia. Dalam sebuah organisasi intra kampus saja dapat dilihat tidak ada kajian mengenai pembahasan yang mengarah kepada permasalahan bangsa, mereka hanya fokus dan sibuk akan kegiatan yang membuat dirinya terkenal keluar.

5. Era Millennial

Generasi Y (generasi *millennial*) adalah generasi yang lahir pada era 80-90an. Banyak istilah populer tentang generasi ini; *connected / digital generation* atau *gen why* yang identik dengan karakter berani, inovatif, kreatif, dan modern. Generasi *millennial* merupakan generasi modern yang aktif bekerja, penelitian, dan berpikir inovatif tentang organisasi, memiliki rasa optimisme dan kemauan untuk bekerja dengan

kompetitif, terbuka, dan fleksibel. Di lain sisi, generasi *Baby Boomers*/generasi X (generasi yang lahir pada era 65-89an) dibesarkan di dalam suatu organisasi dengan struktur organisasi yang hierarkhis dan struktur manajemen yang datar sehingga sistem kerjasama yang timbul di dalam organisasi didasarkan pada tuntutan pekerjaan (*teamwork-based job roles*). (Retnayu Prasetyanti. 2017, hlm 45)

Menurut Destiana Rahmawati (2018, hlm 20) bahwa generasi Y atau millennial lahir sebagai penanda datangnya milenium baru, yaitu milenia 21. Inilah yang membuat sebutan “milenial” lebih diterima dan lebih populer daripada generasi Y. Sebutan lain dari generasi millennial adalah generasi langgas.

Berbeda dengan generasi *Baby Boomers*, generasi *millennial* mempunyai harapan yang sangat berbeda tentang permasalahan ekonomi, lingkungan, hingga persoalan sosial politik. Secara merata generasi *millennial* mempunyai pendidikan yang lebih baik dari para *Baby Boomers*, mereka cukup terbiasa dengan teknologi bahkan sebagian besar dari mereka sangat ahli dengan teknologi. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, generasi *millennial* mampu bekerja kreatif dan selalu mempunyai energi positif di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang sosial politik.

Generasi millennial memiliki karakteristik yang khas. Lahir antara tahun 1977-1995, sehingga generasi ini terdiri atas orang-orang berusia 22-40 tahun. Masa kecil mereka sudah akrab dengan TV berwarna dan memakai *remote control*, sejak masa sekolah sudah menggunakan *handphone* bahkan setiap tahun berganti *smartphone*, dan internet menjadi kebutuhan pokok. Bahkan untuk saat ini internet memiliki peran yang sangat penting. (Destiana Rahmawati. 2018, hlm 20)

Berikut ini tujuh karakter generasi millennial Indonesia yang diungkapkan oleh Dosen Fakultas Psikologi UI Ivan sudjana M.Psi. dan Founder Brightspot Market dan The Goods Dept., Anton Wirjono. (Sebagaimana dikutip Destiana Rahmawati. 2018, hlm 22)

- a. **Melek digital**, generasi millennial adalah generasi yang sangat melek digital. Bahkan mereka adalah pengguna terbesar media sosial. Selanjutnya, melek digital itulah yang mendorong mereka dengan begitu mudah mengekspresikan diri di akun media sosial.
- b. **Konsumtif**, generasi millennial tercatat sebagai segmen yang konsumtif untuk berbelanja, *travelling*, membeli tiket konser dan film sebagai prioritas.
- c. **Saving untuk sesuatu yang diinginkan**, menurut Ivan meskipun tergolong segmen yang konsumtif, generasi millennial juga tercatat sebagai orang yang suka menabung untuk sesuatu keperluan yang sudah pasti.
- d. **Knowledgeable**, generasi millennial adalah generasi yang kritis yang memiliki keingintahuan yang tinggi. Dengan kemudahan mencari informasi lewat internet, maka mereka tahu betul apa yang diinginkan. Mereka akan mencari tahu terlebih dahulu informasi sebelum melakukan pembelian.
- e. **Digital sebagai media komunikasi**, generasi millennial lebih senang berlama-lama di media sosial dan digital. Oleh karena itu menurut Anton, berkomunikasi dengan generasi millennial lebih efektif menggunakan media digital dan sosial.
- f. **Menjadi entrepreneur yang cenderung tanpa persiapan**, generasi millennial lebih tertarik menjadi entrepreneur namun hanya semangat di awal saja. Mereka juga sudah punya semangat *hard work*, tetapi *how to*-nya tidak dipikirkan. Selain itu kemampuan pendukung atau *skill*-nya kurang, kemalasan itulah yang menghambat kesuksesan mereka.
- g. **Mengutamakan fasilitas dan apresiasi di dunia kerja**, generasi millennial lebih memilih fasilitas dan diapresiasi, serta tidak menempatkan gaji sebesar sebagai poin yang utama.

Melihat dari pengertian dan beberapa karakteristik dari generasi millennial dapat disimpulkan bahwa generasi ini merupakan orang-orang yang melek akan kemajuan teknologi dan informasi yang

berkembang di Indonesia, dengan kondisi ini maka akan terjadi perubahan pola kehidupan dilingkungan masyarakat.

Adakah sebuah pandangan umum bahwa nilai-nilai patriotik dan nasionalisme telah hilang dan luntur dari generasi muda. Terkait dengan dunia politik di Indonesia, penting juga diperhatikan cara generasi millennial dalam melihat setiap proses politik knegaraan yang terjadi di Indonesia. Dalam bukunya Destiana Rahmawati yang berjudul *Millennial and I-Generation Life* dijelaskan bahwa survei yang dilakukan oleh *Alvara Research Center* tahun 2004 menunjukkan, pemilih muda Indonesia didominasi oleh *swing voters*/pemilih galau dan *apathetic voters*/pemilih cuek.

Jika diamati semangat sepak bola di gelora bng karno setiap timnas bertanding, malah menunjukkan hal sebaliknya. Ketika melihat respon orang-orang dari generasi millennial melihat di sosial media ketika simbol-simbol negara dilecehkan bahkan kekayaan budaya Indonesia yang diakui oleh negara tetangga. Meraka sangat aktif dan gigih membela martabat bangsa dan negara.

Hal seperti ini yang yang diharapkan dimana generasi millennial ini tidak hanya melek akan media sosia saja namun harus melek akan politik yang sedang terjadi di Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Pada kajian hasil penelitian terdahulu penulis memasukan satu hasil penelitian sejenis yang menggunakan analisis persepsi sebagai proses penelitian. Hasil penelitian terdahulu terkait persepsi mahasiswa terhadap suatu objek dalam kajian komunikasi politik yaitu :

Penelitian terdahulu diambil dari Jurnal Seorang peneliti, Pipit, Widiatmaka yang berjudul “Kendala Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Di Dalam Proses Pembelajaran” tahun 2016 dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dari Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, LPPM UNS. Menurut Pipit, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pendidikan karakter untuk membangun warga negara yang cerdas.

Harmanto (2013, p. 231) memaparkan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kembangkan pola pikir, sikap dan perilaku rukun, damai serta toleran tanpa meninggalkan kebhinekaan yang memang sudah menjadi *given*-nya bangsa Indonesia”. Apabila pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi mata pelajaran atau mata kuliah di era modern dapat menjalankan perannya tersebut, maka akan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Penelitian terdahulu diambil dari Skripsi Rachda Anjani Somawinata yang berjudul “Peranan Sosialisasi Politik Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Mahasiswa” tahun 2017 dengan metode penelitian Studi Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum pahamnya masyarakat terhadap politik dan makin banyaknya oknum-oknum yang bermain kotor dalam politik, berdampak pada masyarakat yang tidak mau mempelajari politik dengan baik dan benar. Ketika generasi muda dipertontonkan dengan kecurangan politik, politik uang, korupsi, kolusi dan nepotisme, tanpa dibekali pendidikan politik yang baik dan benar, mereka akan selalu berpandangan negatif terhadap kehidupan politik. Pandangan yang seperti inilah yang dapat mengikis tingkat partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mereka tidak mau tahu tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh negaranya, mereka tidak peduli terhadap aturan-aturan negara yang tentunya akan berdampak melemahnya rasa persatuan dan kesatuan antar warga Negara. Oleh karena itu, generasi muda dan terutama adalah mahasiswa, merupakan bagian penting yang membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik. Proses terjadinya pendidikan politik di kalangan mahasiswa yaitu melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan.

Kesadaran Politik adalah sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara bagaimana bisa menyikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan Negara dan Pemerintah, sedangkan sosialisasi politik adalah proses bagaimana orang bisa mengenal atau mengetahui atau bisa tanggap dengan sistem politik yang ada serta punya reaksi terhadap adanya gejala gejala politik.

Penelitian terdahulu diambil dari Skripsi Alex Victor Wanma yang berjudul “Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor” dengan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Mengemukakan bahwa yang menjadi persoalan saat ini di era pasca reformasi keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Dibeberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golput (golongan putih) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Selain itu, pelaksanaan partisipasi politik yang sehat masih terancam akan bahaya laten seperti penggunaan politik uang (money politics) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Begitu pula, adanya dugaan permasalahan terkait proses mobilisasi massa di daerah-daerah terpencil yang masih terkendala akses informasi maupun netralitas proses pengawasan.

Permasalahan menurunnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik masyarakat di era pasca reformasi sebenarnya menjadi indikasi kuat belum mendalamnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya hak politik yang dipunyai. Ini merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan segera. Jika persoalan mengenai rendahnya kesadaran politik tidak segera diatasi, maka persoalan ini dapat dianggap sebagai antitesis terhadap cita-cita reformasi yaitu untuk meyelenggarakan kekuasaan negara bagi kepentingan rakyat.

Melihat dari tiga penelitian terdahulu mengenai kesadaran politik masyarakat dapat disimpulkan masih rendah atau masih kurang sadarnya masyarakat terhadap politik. Seringkali masyarakat terlalu cuek akan politik yang ada di Indonesia, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memilih golput (golongan putih) ketika pemilu atau pemilihan umum. Padahal dengan adanya teknologi yang lebih maju dengan modernisasi masyarakat dapat mengakses segala informasi terkait permasalahan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Dengan tidak pedulinya masyarakat kan permasalahan yang dihadapi oleh negara maka akan meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena persatuan dan kesatuan bangsa ini membutuhkan masyarakat yang memiliki rasa sadar akan politik yang memiliki kemelekan terhadap politik. Maka sangatlah perlu kesadaran politik dari masyarakat tentang hak serta kewajiban untuk menyikapi masalah yang ada dilingkup Pemerintahan atau negara.

C. Kerangka Pemikiran

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran atau mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan dasar, yang dimana tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu membentuk karakter warga negara menjadi warga negara yang cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan menurut Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional, PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

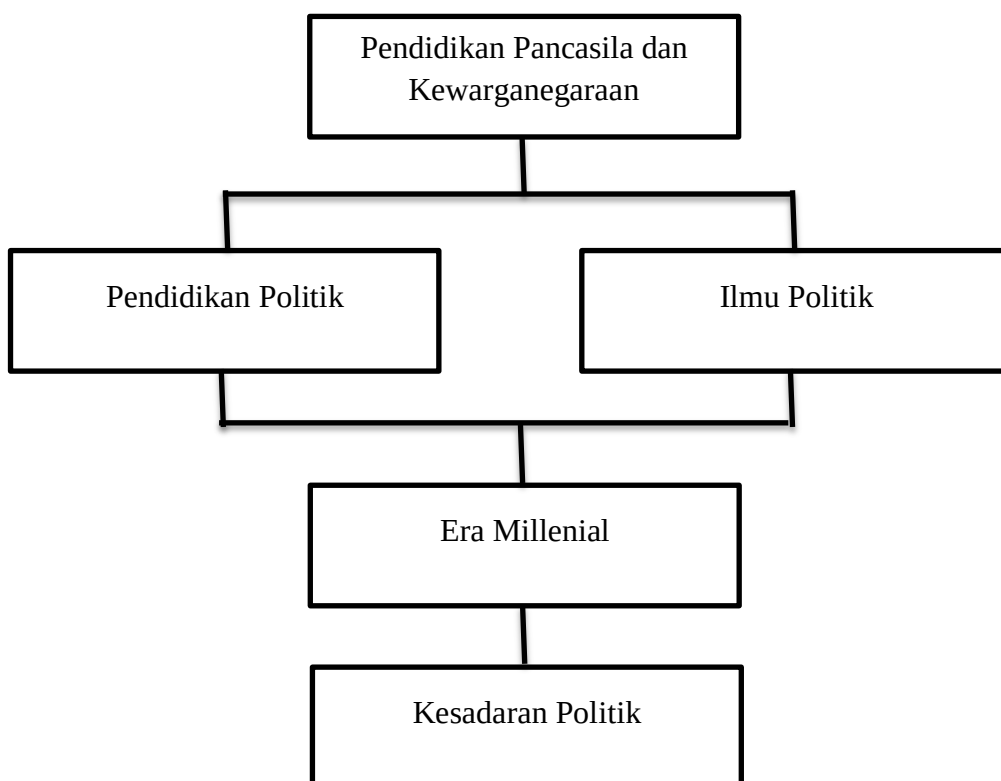
Sudah jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan dibuat untuk pembentukan karakter warga negara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang dimana warga negara salah satunya harus memiliki kemelekan akan politik untuk keikutsertaan warga negara dalam partisipasi membangun bangsa dan negara, serta menjadikan warga negara yang peka akan isu-isu permasalahan negara yang sedang terjadi.

Pendidikan politik yaitu pengetahuan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang memberikan landasan dalam bertindak laku dan kehidupan politik. Dengan pendidikan politik tersebut maka setiap warga negara memiliki kesadaran akan politik dan kehidupan politik namun tetap bertanggung jawab secara etis atau moral untuk mencapai tujuan politik tersebut.

Pendidikan politik tersebut sangatlah penting bagi warga negara untuk menumbuhkan kesadaran politik dan peran serta warga negara dalam kehidupan berangsa dan bernegara. Apalagi dengan mahasiswa yang sering disebut sebagai masyarakat yang berpendidikan atau memiliki intelektual yang tinggi.

Maka dari itu sangat penting pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik terhadap cara berpikir mahasiswa untuk tercapainya tujuan pendidikan dengan membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Untuk mempertegas variable yang menjadi pusat perhatian dari judul, maka penulis merumuskan asumsi sebagai berikut :

- a. Peran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam meeningkatkan kesadaran politik mahasiswa
- b. Tingkat kesadaran politik mahasiswa di era millenial
- c. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pemerintahan

2. Hipotesis

Berdasarkan asumsi diatas penelitian merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- a. Jika pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diajarkan sesuai dengan tujuan yang tertera didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2006 maka akan tercapainya cita-cita dari bangsa Indonesia.
- b. Jika pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diajarkan tidak sesuai dengan tujuan yang tertera didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2006 maka akan tercapainya cita-cita dari bangsa Indonesia.